

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The Medici Effect: Wawasan Terobosan di Persimpangan Ide, Konsep, dan Budaya yang ditulis oleh pengusaha Swedia-Amerika yaitu Frans Johansson. Buku terbitan tahun 2004 ini menggambarkan sebuah keluarga yang menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk seniman, ilmuwan, dan ahli keuangan berkumpul. Berbeda dengan paradigma lama yang memahami bahwa inovasi dan produktivitas erat hubungannya dengan disiplin ilmu tunggal dan spesialisasi, dalam The Medici Effect menjelaskan sebaliknya, bahwa penemuan yang inovatif dan produktif justru lebih banyak ditemukan pada peleburan atau titik temu bermacam disiplin ilmu yang berbeda. Paradigma baru terkait peleburan atau titik temu terbukti berhasil membawa dunia dari zaman kegelapan menuju zaman pembaruan atau disebut sebagai *renaisans*.

Di era yang serba digital, seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah harus dapat melakukan hal yang benar (*doing the right things*), dengan cara yang benar pula (*doing the things right*). Transformasi inovasi harus dapat diorkestrasi oleh seluruh elemen yang ada di daerah. Ibaratkan sebuah kendaraan umum, seorang kepala daerah harus dapat mengatur elemen di dalamnya dan dapat mengantarkannya pada tujuan akhir atau pada titik temu yang diharapkan. Formulasi paradigma baru harus dilakukan dengan menggabungkan potensi daerah, visi kepala daerah, dan kreativitas banyak pihak.

Lompatan-lompatan berkemajuan (*leapfrogging*) sangat dipengaruhi oleh iklim dan atau ekosistem struktur yang terdapat pada pemerintah daerah. Transformasi inovasi harus selaras dengan pentingnya visi dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkannya. Visi dari seorang kepala daerah berguna untuk memberi petunjuk, memberi motivasi, membantu menguatkan niat, meningkatkan kefokuskan, dan menjadikan pekerjaan lebih berarti. Visi baik adalah tidak keluar dari haluan kearifan lokal yang ada. Pemanfaatan potensi daerah menjadi sebuah keadaan alamiah yang harus sebaik mungkin dipadukan oleh kepala daerah dengan berpedoman pada visi yang kuat, serta menggandeng sektor swasta, aparatur pemerintah, masyarakat, dan diatur dalam kebijakan pembangunan

daerah. Kekuatan inilah yang nantinya akan membawa daerah dapat melakukan *leapfrogging* transformasi inovasi.

Konsep *agile* hadir untuk memberi tawaran birokrasi pada sebuah paradigma organisasi yang baru. *Agile Governance* diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Konsep *agile* hadir untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Pada era digitalisasi, konsep ini mampu untuk menjawab seluruh tantangan-tantangan dari perubahan lingkungan. *Agile* adalah software, dan membutuhkan *brainware (analogi manusia)* yang visioner serta inovatif secara esensial (*mudah, cepat, unggul*). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan semangat “Menciptakan Birokrasi yang Berkelas Dunia” serta tertuang dalam PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, berharap inovasi atau pemanfaatan teknologi dan informasi yang akan diciptakan oleh masing-masing kepala daerah dengan maksud dan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, mempermudah layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. *Agile Governance* sebagai dasar perubahan tata kelola yang mengikuti perkembangan zaman secara cepat, serta memberikan yang terbaik dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat adalah kolaborasi dari revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang diharapkan mampu menciptakan inovasi instan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan dan instansi.

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan memberikan anugerah penghargaan UNPSA (United Nation Public Service Award) kepada Azerbaijan dalam inovasinya menciptakan ASAN (Azerbaijan Service and Assesment Network). ASAN merupakan sebuah program yang dijalankan oleh pegawai negeri sipil dalam satu pusat jaringan pelayanan terpadu dengan 400-an urusan masyarakatnya. Dari capaian inilah, banyak dari kabupaten/kota di beberapa negara melakukan studi tiru, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi.

Terdapat pula beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil menciptakan tata kelola berbasis TIK berdasarkan *Agile Governance*. Inovasi-inovasi yang dibuat dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Efektif, efisien, dan transparansi adalah dasar dari terciptanya sebuah program berbasis digital. Adapun kabupaten/kota yang telah berhasil dalam menyelenggarakan *Agile Governance* adalah Surabaya, Bandung, Binjai, Bojonegoro, Yogyakarta, dan Banyuwangi. Seiring perkembangan zaman, roda birokrasi bisa berjalan lebih efisien dengan penggunaan teknologi digital. Selain itu, akuntabilitasnya lebih mudah dipantau. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus digalakkan, tutur Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi Periode 2010-2020). Transformasi inovasi jelas bukan sebuah hal yang mudah dalam melakukannya, dibutuhkan perencanaan yang matang, konsultasi intensif dengan tim IT, jajak pendapat di masyarakat, penyuluhan publik, kontrol pelaksanaan, dan harus adanya kolaborasi kreatif dari seluruh elemen pemerintah daerah terkait beberapa fokus sektor. Sumber daya manusia menjadi garda terdepan dalam terciptanya sebuah pemerintah daerah yang *agile*. Penguatan pada urusan pemerintahan serta pelayanan publik yang sebagian sudah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dengan elektronik atau digitalisasi, dikuatkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yang di dalamnya bermaksud untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi pembangunan, pengembangan, dan pelaksanaan SIMDA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat (*Perbup Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Kabupaten Banyuwangi, Bab 2 Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Asas, Bagian Satu Maksud Pasal 2*). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perbup ini berkenaan dengan penyelenggaraan *Agile Governance* dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Perbup ini jelas

memberikan acuan, pedoman, dan panduan terkait pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perbup Nomor 13 Tahun 2018 Tentang SIMDA dan Perbup Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keduanya mengarah pada koordinasi yang harus dilakukan dengan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Smart City Banyuwangi dengan maksud untuk mengintegrasikan data dan keseragaman dalam pelaksanaan inovasi di pemerintahan daerah.

Kabupaten Banyuwangi pada masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas selama dua periode (2010-2020) dibalut dengan *creative collaboration* bersama dengan seluruh unsur pemerintah, dunia usaha, dan rakyat sebagai andil dalam kemajuan daerah tercinta. Melalui beberapa transformasi inovasi, terhitung hingga saat ini total terdapat 194 penghargaan tingkat regional, nasional, dan internasional. Penghargaan itu didapat dari inovasi dan peningkatan kuantitas, kualitas, dibidang birokrasi, pertanian, keuangan, lingkungan hidup, kesehatan, dan pariwisata. Tidak ketinggalan pula terkait hasil positif yang didapat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintahan (SAKIP), Banyuwangi mendapatkan nilai tertinggi “A” di Indonesia empat tahun berturut-turut (2016-2019).

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting pada sebuah organisasi, terlebih pada ranah pemerintahan. Seorang pemimpin harus dapat memegang kendali, bekerja sama, mempunyai pemikiran yang terbuka, dan menjadi penentu arah, serta dapat mempersiapkan beralihnya tongkat estafet pada kepemimpinan selanjutnya. Seharusnya, pada perubahan zaman yang semakin tidak terduga, dapat membuka pandangan terkait dengan kontestasi politik bukan hanya soal urusan menang atau kalah, petahana ataupun oposisi, serta politik bumi hangus atau transformasional. Akan menjadi sebuah kesia-siaan jika pola pikir seperti itu tetap dilanjutkan seiring perubahan tantangan lingkungan yang masif. Berubahnya mindset khalayak umum tentang Kabupaten Banyuwangi yang berada pada ujung timur Pulau Jawa, dulu dikenal dengan Kota Santet, kini sangat diapresiasi melalui transformasinya menjadi Kota Internet. Bukan tidak mungkin, mindset lama khalayak umum itu akan kembali pada situasi sebelumnya, atau

justru akan semakin dikenal dengan tingkat intensitas perkembangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang inovatif. Hal ini, tergantung bagaimana pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan elemen lain dalam menyikapi peralihan kepemimpinan. Sejatinya, peralihan kepemimpinan adalah melanjutkan yang sudah dilakukan dengan baik dari pemimpin sebelumnya, dan memperbaiki kesalahan yang ada. Bukan membersihkan semuanya atau menyamaratakan hasil baik dan buruk, dan membawa kepemimpinan sesuai dengan yang diinginkan secara pribadi. Jika itu sampai dilakukan, sebuah daerah tidak akan pernah berkembang secara pesat.

Perkembangan transformasi inovasi di Kabupaten Banyuwangi jelas membutuhkan kerja ekstra dan kerja cerdas dalam mencapai *leapfrogging* secara keseluruhan, baik pada sektor OPD, maupun hubungan komunikasi antar masyarakat dan sektor privat. Kolaborasi kreatif antar sektor harus terintegritasi, efektif, efisien, dan aman secara data. *Renaissance* Kabupaten Banyuwangi tercipta karena memiliki sosok pemimpin yang melek akan TIK, cerdas, dan mampu menggali potensi lokal demi perkembangan seluruh sektor. Kerja-kerja OPD digalakkan dengan memanfaatkan potensi SDM yang ada. Belum lagi dalam penggunaan E-Kinerja yang mampu menggenjot inovasi antar dinas, antar bidang di dinas, serta antar individu di masing-masing dinas. Ekosistem persaingan kinerja yang sehat inilah yang terus dipertahankan Banyuwangi hingga saat ini, sehingga mampu dalam penerapan, mempertahankan, serta mengembangkan *Agile Governance*. Permasalahan fundamental yang terjadi saat ini adalah kurangnya integrasi data satu pintu yang menyebabkan tidak efektifnya data yang terkumpul pada masing-masing dinas. Hal ini menyebabkan database ataupun input data yang dilakukan oleh OPD-OPD tidak dapat dipakai oleh OPD lainnya dikarenakan kurangnya item yang ada pada saat input data. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Banyuwangi sebagai *leading sector* beberapa urusan data terkait dengan dinas yang lainnya mencoba memperbaiki integrasi data ini satu demi satu untuk menciptakan kerja yang efektif, serta tidak banyak mengeluarkan anggaran yang sia-sia dalam pengumpulan data kemasyarakatan, dan lebih dapat menjaga data dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dalam perkembangan sebuah daerah yang dapat dibilang sangat

pesat, integrasi jelas menjadi sebuah obyek yang harus dapat diakses secara luas, terjamin keamanannya, dapat memangkas waktu kerja yang sia-sia, dan yang terpenting adalah urusan anggaran yang sebelumnya dipergunakan oleh-oleh masing-masing dinas dalam urusan pengumpulan data, lambat laun akan dapat direlokasi untuk urusan yang lebih penting.

Transisi kepemimpinan dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang sudah menjabat dua periode kepada bupati terpilih periode selanjutnya menciptakan sebuah tantangan baru bagi Kabupaten Banyuwangi pada sektor transformasi inovasi. Capaian-capaian luar biasa yang sudah ditorehkan oleh Abdullah Azwar Anas beserta jajarannya (2010-2020) menjadi sebuah nilai yang harus tetap dipertahankan oleh seluruh pihak, dengan menghindari adanya degradasi kualitas transformasi inovasi pemerintah daerah. Hal inilah yang perlu diteliti, karena inovasi berkaitan dengan visi kuat pemimpin, dan untuk menjalankan atau melanjutkan *Agile Governance* di lingkungan pemerintahan, dibutuhkan implementasi kebijakan *creative collaboration* yang akan dilanjutkan oleh bupati terpilih periode selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menerapkan *Agile Governance*?
2. Seperti apa langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mempertahankan *Agile Governance*?
3. Bagaimana langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menambah inovasi terbaru pada tantangan peralihan kepemimpinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu kepada perumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana penerapan *Agile Governance* pada transformasi inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengidentifikasi hambatan atau kendala yang masih dialami dalam pengembangan inovasi.

3. Mengetahui langkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mempertahankan dan mengembangkan *Agile Governance* Sebagai Bentuk Tranformasi Inovasi di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi pengetahuan, bahan kajian atau informasi dasar pada tantangan masa depan terhadap penerapan, cara mempertahankan, dan mengembangkan *Agile Governance* sebagai tranformasi inovasi.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini yakni sebagai kontribusi pada literasi Ilmu Pemerintahan terkait bagaimana menciptakan ekosistem sumber daya yang adaptif seiring perubahan zaman, melalui peran kepala daerah, publik, dan swasta secara bersamaan.

